



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP  
Nomor 282-12-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:  
APBL Nomor 282-12-25/APBL-DPR-  
DPRD/PAN.MK/2019**

**DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN**

Pemohon : Partai Amanat Nasional (PAN)(Partai Politik)

Provinsi : Sulawesi Utara (Sulut)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	

4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	Agar diperiksa kembali, pastikan keterangan bukti dalam daftar alat bukti sudah sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, contohnya: - Bukti P-2 merupakan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota", namun di keterangan daftar alat bukti ditulis "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi", begitu pun dengan bukti P-3 s.d. bukti P-5 - Keterangan bukti P-6 dalam daftar alat bukti bukti P-6 yang diserahkan
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	- Agar diberikan tanda label yang sesuai dengan daftar alat bukti - Agar urutan alat bukti disesuaikan dengan urutan daftar alat bukti
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data ( <i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i> ).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	ADA	

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.